

**KINERJA BPS SURAKARTA DALAM PENDATAAN RUMAH TANGGA
SASARAN (RTS) PROGRAM RASKIN DI KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi**

Disusun Oleh :

ASRI SINDU PRIHANTINI

D0106006

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

com **2010** *user*

PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Pembimbing

Drs. Sudarto, M.Si

NIP. 195502021985031006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs. Suharsono, M.Si (.....)
NIP. 195107011979031001
2. Sekretaris : Dra. Sudaryanti, M.Si (.....)
NIP. 195704261986012002
3. Penguji : Drs. Sudarto, M.Si (.....)
NIP. 195502021985031006

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Drs. H. Supriyadi SN., SU
NIP 195301281981031001

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

- ❧ *Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya hingga kini dan telah begitu sabar membimbingku. Terima kasih atas dukungan dan doa yang tak pernah putus, serta semangatnya yang telah menguatkan aku. Semoga karya ini bisa menjadi langkah awal bagiku untuk mewujudkan harapan kalian. Amin ...*
- ❧ *Mas Agal, Mb Atik, Mb Anung, Mas Sapto, dan Mas Umar atas segala dukungan dan doa.*
- ❧ *Sahabat setiaaku Riska atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.*
- ❧ *Teman-teman dekatku, Lita, Fela, Anis, Ratih, Ika, Piti, westi, Monika, Lia, Hima, Mer.*
- ❧ *Teman-teman AN'o6.*

MOTTO

*Sesungguhnya Allah bersama orang-orang
yang sabar
(Al-Anfal ayat 46)*

*Allah SWT tidak memberikan beban kepada seseorang
kecuali sesuai dengan kesanggupannya.
(Al-Baqarah ayat 286)*

*Sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya, terkadang
kita perlu melakukan pengorbanan untuk bisa mendapatkan
apa yang kita inginkan,
Maka terus berusaha dan berdoa selagi kita mampu.
(penulis)*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kinerja BPS Surakarta Dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin Di Kota Surakarta”**. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Sudarto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNS dan pembimbing skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sukadi, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
3. Drs. Agung Priyono, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Supriyadi SN, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara atas ilmu yang diberikan selama ini.

6. Bapak Toto Desanto, S.Si selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
7. Ibu Dra. MAB. Herminawati, selaku Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta dan Ibu Leni Kurniawati selaku staff Seksi Statistik Sosial yang selalu sabar membantu dalam memberikan data dan informasi serta kemudahan dalam penelitian ini. Tak lupa kepada seluruh pegawai BPS Surakarta.
8. Ibu Ernita Septiana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Surakarta.
9. Bapak Siswandi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasarkliwon.
10. Mbak Desi, staff Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jebres.
11. Ibu Sri Rejeki dan Bapak Dudung.
12. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan seluruh keluarga besarku yang dengan tulus mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi.
13. Semua teman-teman angkatanku AN '06.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, November 2010

Penulis

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PIKIR.....	12
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Kinerja	11
2. Pendataan Rumah Tangga Sasaran Program Raskin.....	38
3. Kinerja BPS Surakarta Dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin di Kota Surakarta.....	49
B. Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Sumber Data	54
D. Teknik Sampling	55

E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Validitas Data	57
G. Teknik Analisis Data	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Deskripsi Lokasi	62
1. Sejarah BPS Kota Surakarta	62
2. Visi dan Misi	63
3. Tujuan dan Sasaran	63
4. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	64
5. Landasan Hukum	65
6. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	66
7. Identifikasi Pegawai	82
B. Hasil Penelitian.....	85
1. Proses Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS)	91
2. Kinerja BPS dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS)	95
a. Kesesuaian Indikator	97
b. Akurasi Data.....	99
c. Ketepatan Waktu	104
BAB IV PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Kriteria Rumah Tangga Miskin dalam Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005	5
Tabel I.2 Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2005 dan 2008 Kota Surakarta	7
Tabel 2.1 Struktur Kepegawaian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2010.....	81
Tabel 2.2 Struktur Kepegawaian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Pada Tahun 2010	82
Tabel 2.3 Struktur Kepegawaian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada Tahun 2010.....	83
Tabel 2.4 Jumlah RTS di 5 (Lima) Kecamatan Tahun 2009 dan 2010	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Model Kerangka Berpikir	51
Gambar I.2 Model Analisis Interaktif	60
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta Berdasar SK Kepala BPS No. 121 Tahun 200	80



ABSTRAK

Asri Sindu Prihantini, D0106006, Kinerja BPS Surakarta Dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin Di Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan suatu masalah yang sudah mengakar. Kemiskinan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Surakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program, salah satunya Program Raskin. Dalam program ini, BPS bertindak sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pendataan jumlah penerima Raskin di Surakarta. Mengingat masih ada permasalahan yang muncul yaitu perbedaan jumlah penerima Raskin pada periode setiap tahunnya. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pusat Statistik Surakarta dalam pendataan jumlah RTS di Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dapat menggambarkan kinerja Badan Pusat Statistik Surakarta dalam pendataan jumlah RTS di Surakarta. Adapun sumber data yang digunakan meliputi informan dengan cara wawancara dan yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposif sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pusat Statistik Surakarta dalam pendataan jumlah RTS di Surakarta dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator teknis sesuai dengan Renstra yang digunakan untuk menilai kinerja BPS, yaitu Kesesuaian indikator, akurasi data, dan ketepatan waktu. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut dapat diketahui sejauh mana kinerja Badan Pusat Statistik Surakarta dalam pendataan jumlah RTS di Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Badan Pusat Statistik Surakarta dalam pendataan jumlah RTS di Surakarta sudah sesuai dengan standar kerja dalam menentukan RTS yang benar-benar layak untuk mendapatkan raskin. Hal ini dapat dilihat dari terdatanya jumlah penerima Raskin sesuai dengan kondisi di masyarakat, sesuai dengan proses pendataan dengan tujuan untuk mendukung suksesnya Program Raskin, dan proses pendataan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya dari BPS Surakarta untuk mempertahankan kinerja yang sudah sesuai dengan standar kerja dalam menentukan RTS di Surakarta.

ABSTRACT

Asri Sindu Prihantini, D0106006, The Performance of BPS of Surakarta in Household Data Collection Target Raskin Program In Surakarta City, Thesis, Administration Department, Social and Political Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 2010.

The problem of poverty in Indonesia is a problem that has been rooted. Poverty occurs in different parts of Indonesia, one of Surakarta. To overcome this problem, the government has implemented various programs, one of whom Raskin. In this program, Connecticut acts as a government agency whose task is to perform data collection on the number of recipients Raskin in Surakarta. Considering there are still problems that arise are differences in the number of Raskin recipients in the period each year. To that end, researchers are interested in knowing how the performance of Surakarta, Central Bureau of Statistics in data collection on the number of RTS in Surakarta.

The research method used in this research is descriptive qualitative research method that can describe the performance of Surakarta in Central Bureau of Statistics data collection the number of RTS in Surakarta. The source data used include interviews and informants in a way which is derived from the documents and archives relating to the research. Sampling method used is purposive sampling is to select informants who considered knowing and can be trusted to be a source of data. Data collection technique that is by observation, interviews, and documentation. Validity test data using data triangulation technique is similar to test data from various sources. The data analysis technique used is an interactive analysis technique which consists of three components, namely data reduction, data display, and conclusion.

The results of this study indicate that the Central Bureau of Statistics in data collection on the number of RTS Surakarta Surakarta can be measured by using three technical indicators used in accordance with the Strategic Plan to assess the performance of BPS, namely Suitability indicators, data accuracy, and timeliness By using these three indicators can be found as far Where the performance of Surakarta in Central Bureau of Statistics data collection the number of RTS in Surakarta.

Based on the results of these studies concluded that the overall performance of Surakarta, Central Bureau of Statistics in data collection on the number of RTS in Surakarta is in compliance with labor standards in determining the RTS that really deserve to get raskin. This can be seen from the number of recipients Raskin terdatanya accordance with the conditions in society, of due process of data collection in order to support successful Raskin, and data collection process is carried out in accordance with the time allowed. For that, the required effort from Connecticut Surakarta to maintain maximum performance is enough in the data collection the number of RTS in Surakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks bagi setiap negara, terutama negara besar seperti Indonesia. Kebijakan dan penanganannya harus merata dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekisruhan sebagai eksese negatif penanggulangannya. Hingga saat ini masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang berkepanjangan. Seperti yang banyak kita ketahui, kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling dominan di Indonesia. Pada mulanya adalah kemiskinan, lalu pengangguran, kemudian kekerasan dan kejahatan [crime]. Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Maka untuk menjadi bangsa yang besar mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.

Menurut badan PBB (UNDP) indeks kemiskinan manusia (Human Proverty Index) untuk negara-negara berkembang (HPI-1), memfokuskan perhatiannya pada proporsi manusia yang berada dibawah ambang batas dimensi pembangunan manusia yang sama dengan indeks pembangunan manusia, panjang umur dan hidup sehat, memiliki akses terhadap pendidikan, dan standar hidup yang layak. Nilai HP-1 untuk Indonesia, yaitu 18,5, berada di urutan 41 dari 102 negara-negara berkembang yang sudah dihitung indeksinya.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Sumber : (<http://www.bps.go.id/?news=697>, diakses tanggal 19 Desember 2010, pukul 21.28)

Ada berbagai hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini tergantung dari tingkat mobilitas penduduk itu sendiri. Sebagai contoh, penyebab kemiskinan banyak dihubungkan dengan :

1. penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
2. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
3. penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
4. penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
5. penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial

Sumber :(<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> diakses tanggal 25 Maret 2010 pukul 19.30).

Seperti telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa kemiskinan merupakan masalah yang merata di seluruh dunia, maka begitu pula yang terjadi di Indonesia masih terdapat beberapa daerah yang mengalami permasalahan kemiskinan, termasuk salah satunya di Surakarta. Di Surakarta jumlah warga miskin tidak sebanyak di daerah lain di Indonesia, akan tetapi tetap saja ini menjadi masalah bagi pemerintah, khususnya pemerintah Surakarta. Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai mencapai 110.000 orang menurut sumber data yang terpercaya dari <http://harianjoglosemar.com/berita/komisi-iv-data-akurat-wajib-ada-11406.html> (diakses tanggal 25 Maret 2010 pukul 19.30). Permasalahan kemiskinan ini, mengakibatkan banyak hal yang ditimbulkan seperti contohnya, orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, banyak warga yang masih hidup serba kekurangan, bahkan masih banyak pula warga miskin yang tidak mampu membeli beras untuk makan sehari-hari. Berbagai permasalahan diatas muncul karena semakin tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Melihat masalah sosial berupa kemiskinan diatas, maka untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi, Pemerintah menciptakan program dan strategi berupa penanggulangan kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi masih saja belum dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program-program yang telah dilakukan untuk meminimalisasi kemiskinan yang terjadi di Kota Surakarta antara lain BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pengobatan Gratis dan Program Raskin (Beras untuk orang miskin). Tetapi

dalam kenyataannya, bukan berarti dalam pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut sukses dalam implementasinya. Masih banyak pro kontra mewarnai implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang pendataan RTS (Rumah Tangga Sasaran) salah satu program Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Program Raskin. Program Raskin ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan wakil lembaga pemerintah non departemen tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Begitu pula seperti yang dilaksanakan di kota Surakarta, Pemkot melaksanakan Program Raskin untuk membantu masyarakat miskin di Surakarta kota melalui Bulog Kota Surakarta. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg KK per bulan dan maksimal 20 Kg KK per bulan netto dengan harga netto Rp 1.000-Rp 1.600 per kg di titik distribusi.

Salah satu tujuan program Raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan, sasaran Program Raskin adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga miskin

Sumber: (<http://semarang.go.id/simpeda05/Simperek/raskin/raskin.htm>, diakses 17 Mei 2010, pukul 20.15).

Dalam pelaksanaan Program Raskin ini, tidak semua orang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi beras dari Pemerintah. Terdapat kriteria-kriteria tertentu mengenai siapa saja yang berhak sebagai penerima manfaat. Seperti disebutkan dibawah ini kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima subsidi beras dari Pemerintah.

Tabel 1.1

Kriteria Rumah Tangga Miskin

Dalam Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2008 (PPLS08)

VARIABEL	KETERANGAN
1. Luas Lantai	Kurang dari 8 m2 per kapita
2. Jenis Lantai	Tanah/Bambu/Semen berkualitas Rendah
3. Jenis Dinding	Bambu/Rumbia/Kayu/Tembok berkualitas rendah
4. Fasilitas Buang Air Besar	Tidak Punya/Bersama/Umum/Lainnya

5. Sumber Air Minum	Sumur atau mata air terlindung/sungai/Air Hujan
6. Penerangan Utama	Bukan Lisitrik
7. Bahan Bakar Masak	Kayu/Arang/Minyak Tanah
8. Konsumsi Makanan	Membeli Baging/Ayam/Susu, maksimal 1 kali dalam seminggu
9. Frekuensi Makan	Makan Maksimal 2 kali sehari.
10. Konsumsi Pakaian	Membeli pakaian, Maksimal 1 Stel untuk ART dalam setahun
11. Kemampuan Berobat	Tidak Mampu ke Puskesmas
12. Lapangan Pekerjaan	Buruh Tani/Bangunan atau Pekerjaan Lain dengan Pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan Tertinggi KRT	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD/ Hanya SD
14. Kepemilikan Asset	Tidak mempunyai Tabungan/ Barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti : Sepeda Motor, Emas, Ternak, Kapal Motor atau Barang Modal Lainnya.

Sumber : Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2008

Menurut tabel diatas, dalam penentuan jumlah Rumah Tangga Sasaran yang ditentukan dari kriteria-kriteria diatas, Pemerintah Kota Surakarta menginstruksikan kepada BPS untuk melakukan pendataan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan menerima subsidi beras dari Pemerintah berdasarkan kriteria diatas. Kemiskinan menurut Inpres nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Raskin dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengeluaran keluarga yang terdiri atas 4 anggota keluarga. Golongan sangat miskin adalah mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 1.900 kalori per hari, yang senilai dengan Rp.120.000,- bila disetarakan dengan pengeluaran seseorang per bulannya (atau Rp.480.000,- per rumah tangga per bulan). Golongan miskin adalah mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai 2.100 kalori per hari, yang senilai dengan Rp.150.000,- bila disetarakan dengan pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp.600.000,- per

rumah tangga per bulan). Golongan hampir miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2.300 kalori per hari, yang senilai sampai dengan Rp.175.000,- bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp.700.000,- per rumah tangga per bulan). Untuk menentukan tingkat kemiskinan dapat diketahui dengan melihat rata-rata tingkat pengeluaran per orang per bulan dengan cara membagikan jumlah pendapatan dengan jumlah tanggungan.

Kerja BPS dalam pendataan ini sangat penting untuk menentukan jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang akan mendapatkan jatah beras miskin. Karena dalam proses implementasi sampai pada evaluasi, program ini diharapkan tepat sasaran mengingat bahwa program ini ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penentuan jumlah penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit dengan adanya kriteria-kriteria tersebut. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin agar program raskin pada akhirnya sesuai dengan implementasinya dan tepat sasaran.

Permasalahan juga terkadang muncul karena jumlah RTS yang berbeda pada setiap periode pendataannya. Terdapat beberapa kasus yang muncul, seperti misalnya masyarakat miskin yang pada periode pertama dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sasaran, akan tetapi pada periode kedua tidak tercantum. Hal ini dikarenakan adanya penentuan RTS berdasarkan kriteria tersebut diatas. Seperti digambarkan dalam tabel dibawah ini, jumlah pada tahun 2005 tidak sama dengan

tahun 2008. Perbedaan jumlah tersebut terjadi karena adanya sejumlah masyarakat yang tidak dapat dikategorikan lagi sebagai masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran Raskin tersebut.

Tabel 1.2

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) tahun 2005 dan 2008

Kota Surakarta

No.	Kecamatan	Jumlah RTS	
		2005	2008
1.	Laweyan	4.417	2.915
2.	Serengan	2.376	2.099
3.	Pasarkliwon	5.549	4.649
4.	Jebres	6.211	5.360
5.	Banjarsari	1.930	6.931
JUMLAH		20.483	21.954

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2008

Melihat data tersebut diatas, hasil pendataan jumlah RTS tahun 2005 berbeda dengan tahun 2008. Sehingga muncul pertanyaan adalah apakah hasil dari pendataan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilakukan oleh BPS tersebut sudah sesuai dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Untuk mengetahui apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ada, dapat diketahui dengan cara mengukur kinerja BPS atau dengan kata lain melakukan penilaian terhadap kinerja BPS Surakarta dalam proses pendataan RTS Program Raskin di Kota Surakarta.

Tujuan umum dari adanya penetapan kinerja adalah untuk intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efisiensi

dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, serta percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain tujuan umum, dalam penetapan kinerja juga mempunyai tujuan khusus yaitu:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya,
- 3) menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah,
- 4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 5) untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan pondasi yang penting dalam membangun suatu manajemen kinerja. Dengan pengukuran kinerja ini maka suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui *progress* realisasi kinerja yang dihasilkan, maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan

pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dari hal tersebut diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Kinerja BPS dalam Pendataan RTS Program Raskin”. Dengan penelitian ini nantinya akan diketahui apakah hasil dari pendataan tersebut sesuai dengan kriteria penerima Raskin yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kinerja BPS Surakarta dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Surakarta ?
2. Apakah hasil pendataan RTS di Surakarta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional

Tujuan operasional dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja BPS Surakarta.

2. Tujuan Fungsional

Tujuan fungsional dari penelitian ini yaitu :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memahami Kinerja BPS Kota Surakarta.

commit to user

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat kepada BPS Kota Surakarta dalam rangka peningkatan kinerja.

3. Tujuan Individu

Tujuan individu dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Agar penelitian ini bermanfaat bagi BPS Kota Surakarta sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk membantu penelitian selanjutnya yang sejenis.
3. Mempraktekkan teori-teori administrasi negara atas permasalahan kinerja organisasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA BERPIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Di berbagai media, istilah kinerja sudah sangat populer terdengar, akan tetapi pengertiannya sendiri belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga masih belum terlalu banyak yang mengerti dengan istilah tersebut. Secara etimologis, kinerja berasal dari kata *performance*. *Performance* berasal dari kata *to perform* yang mempunyai beberapa arti yaitu : melakukan, memenuhi, atau menjalankan sesuatu, melaksanakan suatu tanggung jawab dan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi dalam (Joko Widodo, 2008: 78-79). Dengan kata lain, kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat

commit to user

keberhasilan individu atau kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. (Mohamad Mahsun, 2009:25)

Dalam *Int. J. Business Performance Management*, Vol.10, No.1, 2008 Copyright “*The strategic management of operations system Performance*”, Edson Pinheiro de Lima (2008: 113) menyatakan bahwa “*A strategic PM (Performance Management) system may be defined as a system that uses the information to produce a positive change to organizational culture, systems and processes*”

Kinerja merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Rogers dalam Mahmudi, 2007:6)

Dari pengertian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

commit to user

Kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi Bastian (2001:329). Yuwono, dkk (2002:23) juga mengatakan bahwa konsep kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam rantai nilai (*value chain*) yang ada pada organisasi.

Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Joko Widodo (2008:78-79) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Swanson dan Holton III dalam Yeremias (2004:211) membagi kinerja atas tiga tingkatan yaitu : kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu. Menurut Ahmad Ruky istilah kinerja / prestasi sendiri sebenarnya adalah pengalihbahasaan dari kata *performance*.

Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah *in-put* menjadi *out-put* (hasil kerja). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi, di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas seluruh aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Soesilo (2000:22-12-22-13), kinerja suatu organisasi birokrasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

1. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;
2. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
3. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal;
4. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi;
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Yuwono, dkk (2002:53), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif. Sedangkan Ruky (2001:7) mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

- a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
- c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruang, dan kebersihan.
- d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
- e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
- f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lain.

Selanjutnya Atmosoeprapto (2001:11-19) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, yaitu :

1. Faktor eksternal yang terdiri dari :
 - a. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli

untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.

- c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
2. Faktor internal yang terdiri dari :
 - a. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
 - b. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formalnya.
 - c. Sumber daya manusi, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - d. Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Hessel Nogi (2005:182) menyimpulkan bahwa dari banyak faktor telah dikemukakan, terdapat faktor yang dianggap dominan dalam mempengaruhi tingkat kinerja yang dapat dicapai oleh suatu organisasi baik faktor internal maupun eksternal. Ada yang mempersoalkan peralatan, sarana prasarana, atau teknologi sebagai faktor dominan, ada yang mempersoalkan kualitas sumber daya manusia, yang dimiliki oleh organisasi, dan ada yang mempersoalkan mekanisme kerja, budaya organisasi, serta efektivitas organisasi kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi.

Sedangkan Mahmudi (2007: 21) menyebutkan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

- 1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
- 2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
- 3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim;
- 4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;
- 5) Faktor kontekstual (situasi), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-masing sehingga permasalahan

yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi.

Dijelaskan pula bahwa kinerja yang belum optimal pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, akan tetapi dari sekian banyak faktor yang telah diidentifikasi ada tiga faktor penting yang dianggap mempengaruhi kinerja, yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Menurut Susanto (1997:13) bahwa aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya atau *human resources*). Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan.

Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan karyawan maupun staf dalam menjalankan roda organisasi secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia bertumpu pada dua indikator penting, yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para karyawan dan tingkat ketrampilan yang berkaitan dengan bidang kerja yang ditangani para karyawan tersebut. Pendidikan merupakan aspek kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dan melekat sesuai dengan atribut yang dimiliki karyawan yang bersangkutan, sedangkan ketrampilan yang dimiliki karyawan untuk

mengerjakan proses kerja yang ada pada unit organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Struktur Organisasi

Menurut Suwanto (1999:158), suatu organisasi akan menunjukkan kinerja yang tinggi jika aspek kepemimpinan dan struktur memberikan fokus dan pengarahan dalam upaya mendorong seluruh karyawan pada suatu tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi. Struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara tugas-tugas yang ada dalam organisasi. Sedangkan Gitosudarmo dan Sudita (1997:241) menyebutkan elemen-elemen utama struktur organisasi meliputi pembagian tugas (*division of labor*), departementalisasi, rentang kembali, delegasi wewenang, dan mekanisme koordinasi.

Menurut Stoner (dalam Hardjito, 2001:26) mengatakan terdapat lima unsur yang ada dalam struktur organisasi, yaitu spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, serta ukuran satuan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah kesesuaian pembagian pekerjaan antara struktur dan fungsi, dimana terjadi penumpukan atau kekosongan pelaksanaan pekerjaan dan ada tidaknya hubungan dan urutan diantara unit-unit kerja yang ada.

c. Kepemimpinan

Berkaitan dengan kepemimpinan, Thoha (1987:1) mengemukakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal, sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan yang ada. Efektivitas kepemimpinan berpengaruh terhadap tingkat kinerja karena kemampuan pimpinan dapat mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran kepemimpinan terhadap kinerja organisasi dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dalam organisasi perlu diorganisir secara tepat dan efisien, sehingga dibutuhkan kemampuan pimpinan dalam melakukan koordinasi.

Seperti yang dikatakan dalam Yermias T. Keban (2004:220-221) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penilaian kinerja di Indonesia maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut :

Pertama, kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat, merupakan faktor penting. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengontrol perbuatan tersebut.

Kedua, manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang menilai, bagaimana menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam

manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.

Ketiga, kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi kerja yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.

Keempat, komitmen para pemimpin atau manager organisasi publik terhadap pentingnya suatu penilaian kinerja. Apabila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada di bawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

c. Indikator kinerja

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja secara tidak langsung maka dibutuhkan beberapa indikator kinerja. Mohamad Mahsun (2009:71) mengemukakan bahwa indikator kinerja (*performance indicators*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja

yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif.

Pengertian indikator kinerja menurut Lohman (dalam Moh. Mahsun, 2009:71) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Sementara itu, menurut Bastian (2001:33) indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Bastian mengemukakan beberapa elemen-elemen indikator kinerja yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya baik barang maupun jasa.
- b. Indikator keluaran (*ouputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kumorotomo (dalam Agus Dwiyanto, 2002:52) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain :

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan dan keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya akan mampu dijawab kriteria ini.

d. Daya tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Joko Widodo (2008: 91), indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dapat dijadikan patokan (standar) untuk menilai keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program dalam mencapai misi dan visi organisasi. Joko Widodo (2008: 91-92) menyebutkan indikator kinerja tersebut adalah

- 1) Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- 2) Indikator keluaran merupakan segala berupa produk sebagai hasil langsung pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasar masukan dan program.
- 3) Indikator hasil merupakan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Merupakan seberapa jauh setiap produk/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Indikator manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses publik.

- 5) Indikator dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lain yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006:174) menjelaskan bahwa indikator-indikator kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penelitian yang dilakukan dalam proses penemuan dan penggunaan indikator tersebut. Dari sekian banyak indikator yang ada, kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1) Indikator kinerja yang berorientasi pada proses, yang meliputi :

a. Efektivitas

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus mengacu pada visi organisasi.

b. Produktivitas

Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya Pemerintah Daerah harus dapat menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang sesedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat

commit to user

tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang semurah-murahnya.

d. Kepuasan

Kepuasan artinya seberapa jauh Pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat.

e. Keadilan

Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

2) Indikator-indikator yang berorientasi pada hasil, yang meliputi :

a. Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas adalah kemampuan perusahaan atau pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap pemerintah terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan masyarakat.

b. Responsibilitas

Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

commit to user

c. Akuntabilitas

Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

d. Keadaptasian

Adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

e. Kelangsungan hidup

Artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah atau program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain.

f. Keterbukaan/transparansi

Keterbukaan atau transparansi adalah bahwa prosedur/tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

g. Empati

Adalah perlakuan atau perhatian Pemerintah daerah atau penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Agus Dwiyanto (2002:49) mengemukakan bahwa penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopoli sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Untuk itu Agus Dwiyanto mengemukakan lima indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima

commit to user

dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas layanan seringkali diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antar program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan

commit to user

kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk pula.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika akan berbenturan dengan responsivitas.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

commit to user

Selain indikator kinerja yang disebutkan oleh beberapa tokoh diatas, BPS juga mempunyai kriteria tersendiri untuk penilaian kinerjanya. Seperti yang disebutkan dalam Renstra BPS, mengingat bahwa evaluasi kinerja setiap instansi pemerintah sudah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka indikator kinerja yang akan menjadi pedoman penilaian kegiatan BPS adalah kinerja teknis. Indikator kinerja teknis tersebut antara lain, kesesuaian indikator, akurasi, dan ketepatan waktu (timeliness) dari data yang dihasilkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator-indikator tersebut untuk meneliti apakah pendataan RTS sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Pemerintah.

d. Pengukuran/Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja akan menimbulkan perbaikan atau peningkatan kinerja karyawan yang kemudian akan berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. James B. Whittaker (dalam Hessel Nogi, 2005:171) mengemukakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objective*).

Definisi yang dikemukakan Whittaker tersebut tidak jauh berbeda dari definisi yang tertuang dalam *Reference Guide, Province of Alberta, Canada* (dalam Hessel Nogi, 2005:172) yang menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (dalam Hessel Nogi, 2005:172) juga mengemukakan bahwa tolok ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang telah dicapai oleh organisasi tersebut, karena satuan ukur yang relevan digunakan adalah efisiensi pengelolaan dana dan tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada publik.

Adapun manfaat penilaian kinerja organisasi dikatakan oleh Bastian (dalam Hessel Nogi, 2005:173) akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan terus-menerus (berkelanjutan). Secara terperinci, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi;
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati;
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya;
4. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati;
5. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7. Membantu proses kegiatan organisasi;

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif;
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan;
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi;

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme dalam memberikan penghargaan atau hukuman (reward/punishment), akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja, yang mana penerapan sistem manajemen kinerja akan membawa dampak positif bagi sebuah organisasi, karena dengan melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi baik dari level yang paling rendah maupun level yang tertinggi dalam organisasi, akan berpengaruh terhadap manajemen organisasi, kepemimpinan, dan juga meningkatkan kualitas dalam kehidupan kerja karyawan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Juhani Ukko (2008: 89) dalam *Int. J. Business Performance Management*, Vol.10, No.1 yang menyatakan “*Performance measurement is quite often viewed from the perspective of the management. The management sets the targets and applies performance measurement to monitor whether these targets are met.*”

Menurut Vincent Gaspers (2004:59) jenis-jenis ukuran kinerja yang umum digunakan antar lain:

- a. Ukuran-ukuran input (*input measures*) merupakan sumber-sumber daya yang digunakan untuk menyerahkan dan juga menampilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ukuran-ukuran input tidak

commit to user

bermanfaat untuk mengukur kinerja, karena hanya digunakan sebagai informasi untuk menentukan ukuran-ukuran kinerja produktivitas dan efisiensi.

- b. Ukuran-ukuran output (*output measures*) merupakan informasi tentang volume produk (barang dan jasa) yang diserahkan atau tingkat aktiitas (beban kerja) dalam program-program tertentu. Ukuran output saja memiliki keterbatasan untuk dijadikan sebagai ukuran kinerja karena biasanya tidak mampu menjelaskan apakah sasaran program telah tercapai, dan tidak memberikan indikasi tentang kualitas dan efisiensi dari pelayanan atau program.
- c. Ukuran-ukuran outcome (*outcome measures*) merupakan dampak dari pelayanan terhadap masalah atau kondisi yang sedang diperhatikan. Ukuran ini mengidentifikasi dampak aktual atau manfaat publik dari suatu tindakan organisasi publik.
- d. Ukuran-ukuran kualitas (*kualitas measures*) merupakan informasi tentang bagaimana baiknya pelayanan publik yang diberikan itu memenuhi ekspektasi pelanggan atau stakeholder.
- e. Ukuran-ukuran efisiensi (*efficiency measures*) merupakan informasi tentang bagaimana baiknya sumber-sumber daya digunakan dalam memberikan pelayanan publik. Ukuran-ukuran efisiensi mengidentifikasi biaya, unit biaya, atau produktivitas yang berkaitan dengan outcome dan output tertentu.

Selanjutnya mengenai konsep kinerja organisasi, Larry D. Stout dalam Hessel Nogi (2005 :174) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Seperti yang tertera dalam *Int. J. Business Performance Management*, Vol. 10, No. 1, 2008, Edson Pinheiro de Lima (2008: 112) yang menyatakan “ *The performance measurement is the process of quantifying the efficiency and effectiveness of action. A performance measurement system is the set of metrics used to quantify both efficiency and effectiveness of actions*”.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Statistik BPS tahun 2005-2009, dalam bab VII Pemantauan dan Evaluasi Kinerja menerangkan tentang indikator kinerja BPS. Tujuan utama dari evaluasi kinerja adalah untuk mendapatkan pelajaran dari pengalaman mengenai hasil, manfaat, dan dampak dari suatu kegiatan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang telah beberapa lama berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan kaji ulang. Dengan demikian, dalam situasi sumber daya yang terbatas, kinerja dari suatu kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan dapat lebih ditingkatkan.

Mengingat bahwa evaluasi kinerja setiap instansi pemerintah sudah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka indikator kinerja yang akan menjadi pedoman penilaian kegiatan BPS adalah kinerja teknis. Indikator kinerja ini dijabarkan melalui antar lain,
commit to user

kesesuaian indikator, akurasi, dan ketepatan waktu (timeliness) dari data yang dihasilkan.

Kesesuaian indikator. Istilah kesesuaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecocokan, keselarasan (kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:831). BPS merupakan instansi dalam bidang perstatistikan. Di BPS terdapat beberapa data yang menjadi unggulan, yaitu kemiskinan, ekonomi, inflasi dan pengangguran. Data tersebut menjadi nilai jual bagi BPS dan juga penting bagi pemerintah karena pemerintah membutuhkan data yang sesuai dan disediakan oleh BPS. Oleh karena itu, BPS harus menjaga indikator tersebut agar yang dihasilkan juga sesuai. Sesuai dengan Undang-undang Statistik Nomor 16 tentang Tugas dan Fungsi BPS yaitu melakukan / memberikan data statistik baik untuk pemerintah maupun non pemerintah yang mendukung sistem statistik nasional. Kaitan dengan pembangunan, data yang dihasilkan oleh BPS dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan.

Akurasi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti kecermatan, ketelitian, ketepatan. Di BPS akurasi data sangat diperlukan dalam menyediakan data statistik. Hal ini sesuai dengan misi BPS yaitu penyedia statistik berkualitas, dan juga untuk melaksanakan misi BPS yaitu :

- a. Menyediakan informasi statistik yang berkualitas : lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan.

- b. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan (<http://www.damandiri.or.id/file/hadiyahfitriyahunairbab2.pdf>). Di BPS dalam menyajikan data untuk masyarakat ada yang dinamakan *time schedule*, mulai dari waktu pengolahan, pencacahan hingga penyajian. Terdapat konsisten dalam menyajikan data. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi bulan, karena data yang telah melewati batas bulan yang ditentukan sudah tidak terpakai. Satu hal yang penting untuk menjaga konsistensi antara waktu dan daerah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan oleh BPS sudah ditetapkan waktunya dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut.

2. Pendataan Rumah Tangga Sasaran Program Raskin

a. Program Raskin

Program Raskin merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial. Pemerintah melakukan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 3 kluster yaitu, Kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II

pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan Kluster III pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat.

Program Raskin merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS tahun 2008 yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Rumah Tangga Miskin, Rumah Tangga Hampir Miskin. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah :

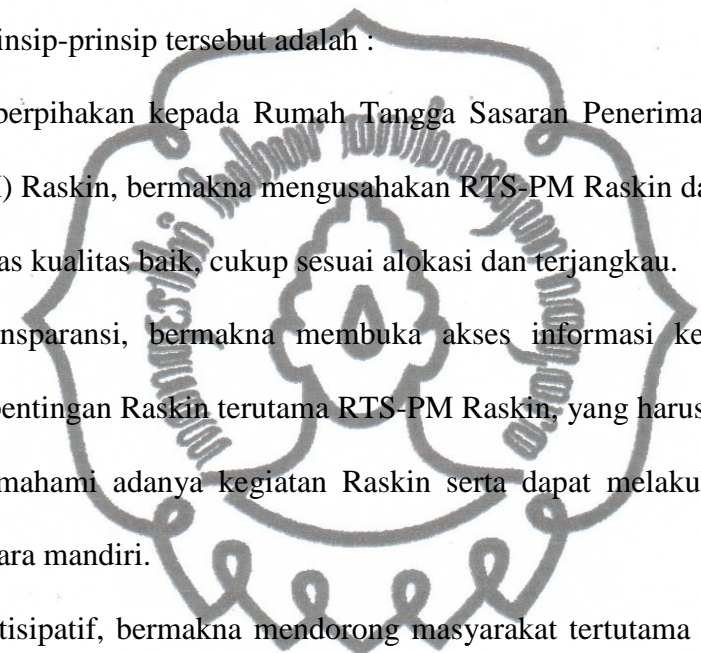
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
9. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
10. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
12. Inpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
14. Kepmemko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran dari program Raskin tersebut adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui

pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/tahun atau setara dengan 13 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp 1.600,- per kg netto di TD.

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

- 
- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
 - b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
 - c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
 - d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau pihak yang telah disepakati.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai

kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang. Penanggungjawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di provinsi adalah gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim ini beranggotakan unsur dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomia, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan perum BULOG.

Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan tugas dari tim ini adalah melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaann program Raskin. Sedangkan fungsi dari Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin tingkat Provinsi. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Tugas dari Tim ini adalah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan program Raskin di Provinsi.
- b) Penyusunan pedoman Pelaksanaan Program Raskin.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program raskin.
- d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota.

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Tim ini mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi

serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a) Perencanaan program Raskin di Kabupaten/kota.
- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/kota.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di kabupaten/kota.
- d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan.
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan.
- f) Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Tim ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

commit to user

- a) Perencanaan distribusi program raskin di kecamatan.
- b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebaran informasi program Raskin di kecamatan.
- c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi desa/kelurahan.
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa/kelurahan.

5. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan, bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah.

Tugas dari Pelaksana Distribusi Raskin ini adalah :

- a) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di TD.
- b) Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.
- c) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

Sedangkan fungsi dari Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan adalah :

- a) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.
- b) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan menyetorkannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog.
- c) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

6. Satker Raskin

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivire / Kasubdivre / Kakansilog Perum BULOG sesuai dengan tingkatannya.

Satker Raskin terdiri dari ketua dan Anggota. Tugas Ketua menganglat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya tanpa sepengetahuan Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog. Selain itu ketua juga mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.

Program Raskin ini mempunyai beberapa indikator kinerja yaitu tercapainya target 6T, yaitu :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-I.

2. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan harga ketentuan yang berlaku yaitu 156 kg/RTS/tahun.
3. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

b. Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Pendataan berasal dari kata *data* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:187) mempunyai pengertian keterangan yang benar dan nyata. Sedangkan kata pendataan berarti pengumpulan data atau pencarian data. Dalam hal ini berkaitan dengan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dalam buku pedoman Pencacah BPS (2008:9), disebutkan Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga maupun yang sementara tidak ada pada waktu pencacahan. Orang yang telah tinggal dalam rumah tangga selama 6 bulan atau lebih, atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap/berencana tinggal selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Sebaliknya anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi

dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan/lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Dalam Buku Pedoman Umum Raskin (2010:3) RTS adalah Rumah Tangga hasil pendataan PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) BPS tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat.

Landasan hukum dari pelaksanaan PPLS didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi BPS.
5. Inpres No.3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengadakan penyediaan dan pengolahan data yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan Raskin ini, BPS bertugas dalam pendataan RTS untuk program Raskin tersebut.

Dalam pembagian Raskin tersebut, beberapa kriteria untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan Raskin. Seperti yang terdapat dalam

pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2008, beberapa kriteria Kriteria tersebut diantaranya :

- a. Luas lantai : kurang dari 8 m² per kapita.
- b. Jenis dinding.
- c. Jenis Lantai.
- d. Fasilitas buang air besar.
- e. Sumber air minum.
- f. Penerangan utama.
- g. Bahan bakar masak.
- h. Konsumsi makanan.
- i. Frekuensi makan.
- j. Konsumsi pakaian.
- k. Kemampuan berobat.
- l. Lapangan pekerjaan.
- m. Pendidikan tertinggi KRT.
- n. Kepemilikan asset.

3. Kinerja BPS Surakarta Dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin Di Kota Surakarta

Program Raskin adalah satu program yang dilaksanakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Program Raskin merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga

Miskin. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Dalam pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran serta BPS. Kaitan dengan program Raskin ini, BPS bertugas untuk mendata jumlah warga yang termasuk dalam Rumah Tangga Sasaran yang akan menerima Raskin. Dalam proses pendataan jumlah RTS tersebut BPS menentukan jumlah warga miskin dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dengan metode statistik. Setelah melakukan Susenas, dapat ditemukan 14 kriteria penerima Raskin yang paling mempengaruhi dari berbagai kriteria warga miskin. Data tersebut dilaporkan kepada Pemerintah dan BPS Pusat. Kemudian BPS Pusatlah yang akan menentukan siapa saja yang nantinya berhak untuk menerima Raskin berdasarkan 14 kriteria tersebut.

Untuk mengetahui apakah data jumlah penerima raskin sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dapat dilakukan penilaian kinerja BPS dengan menggunakan faktor-faktor tersebut, yaitu 14 kriteria penerima Raskin.

Dengan demikian, dapat diketahui apakah jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan tersebut.

B. Kerangka Berpikir

Dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi, Pemerintah melakukan berbagai program salah satunya Raskin. Program Raskin merupakan salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan berupa

pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Selain itu, program ini juga berguna untuk meningkatkan akses pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin.

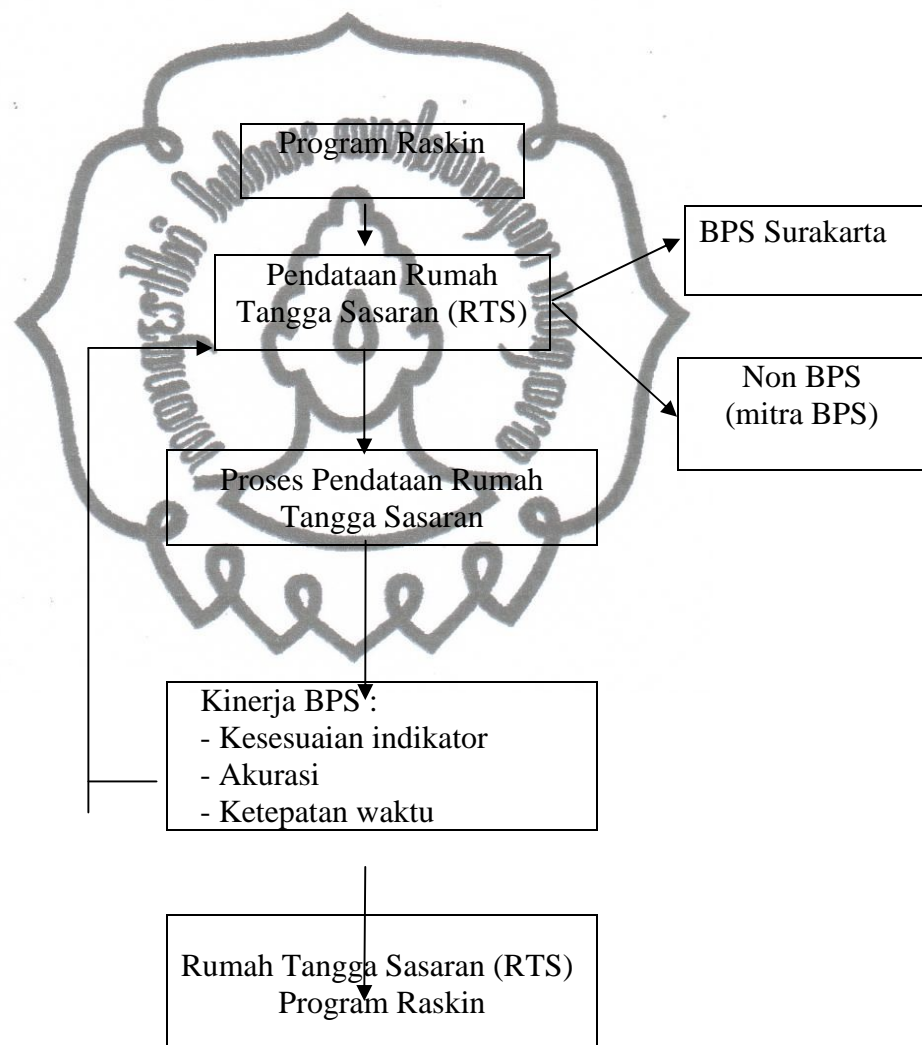
Dalam program Raskin ini, BPS berperan serta dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin. Untuk melaksanakan proses pendataan tersebut BPS menentukan jumlah warga miskin berdasar data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Setelah melakukan Susenas, dari berbagai faktor kriteria penerima Raskin, diketahui faktor-faktor atau kriteria penerima Raskin yang paling mempengaruhi adalah 14 kriteria, yaitu : (1) Luas lantai : kurang dari 8m² per kapita, (2) jenis dinding, (3) jenis lantai, (4) fasilitas buang air besar, (5) sumber air minum, (6) penerangan utama, (7) bahan bakar masak, (8) konsumsi makanan, (9) frekuensi makan, (10) konsumsi pakaian, (11) kemampuan berobat, (12) lapangan pekerjaan, (13) pendidikan tertinggi KRT, (14) kepemilikan asset. Setelah itu, BPS menyampaikan keempat belas kriteria tersebut kepada Pemerintah.

Setelah ditentukan 14 kriteria penerima Raskin, BPS melakukan pendataan. Dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS), BPS Surakarta dibantu oleh mitra BPS yang berasal dari luar (non BPS). Dari pendataan tersebut dapat diketahui apakah jumlah penerima Raskin sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau belum dengan melakukan penilaian terhadap kinerja BPS menggunakan indikator-indikator yang terdiri dari kesesuaian indikator, akurasi, dan ketepatan waktu (timeliness).

Untuk lebih memperjelas kerangka berpikir ini, akan kami sajikan dalam bentuk gambar (*Gb 1.1*) berikut :

Gambar 1.1

Model Kerangka Berpikir



BAB III

commit to user

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik yang beralamatkan di Jalan P. Lumban Tobing No. 6, Surakarta. Alasan-alasan pemilihan lokasi ini adalah :

- a. Pihak Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung untuk memberikan data-data atau informasi yang penulis butuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
- b. Belum adanya penelitian sejenis yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Surakarta.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan, memaparkan, menerangkan, dan melukiskan serta menafsirkan secara terperinci tentang kinerja Badan Pusat Statistik Surakarta khususnya dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran. Sifat penelitian semacam ini mampu memperlihatkan secara langsung hubungan transaksi antara peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian kedalaman makna. (H.B. Sutopo, 2006 : 40)

Menurut Masri Singarimbun (1999:4-5) penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

C. Sumber Data

Data merupakan fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. Dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan sumber-sumber data yang akan mendukung dalam proses penelitian. Data yang diperlukan oleh peneliti adalah yang berhubungan dengan pendataan RTS. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Dalam penelitian ini posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi (H.B Sutopo, 2006:58). Informan yang telah dipilih oleh peneliti antara lain :

- a) Staff BPS
- b) Pengurus Raskin di wilayah Kelurahan.
- c) Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program Raskin (RTS).

2. Dokumen dan arsip

Selain data yang diperoleh dari informan diatas, penelitian ini juga diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti dokumen,
commit to user

arsip, dan buku pedoman serta literatur yang terkait dengan penelitian ini. dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendataan RTS. Adapun dokumen tersebut antara lain :

- a) Renstra BPS Indonesia tahun 2005-2009.
- b) Buku Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005.
- c) Buku pedoman Pendataan Program Perlindungan Sosial BPS tahun 2008.
- d) Pedoman Umum Raskin Tahun 2010.
- e) Petunjuk pelaksanaan Raskin di provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

D. Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam teknik ini peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.

Dalam penelitian deskriptif, cuplikan yang diambil lebih bersifat objektif. Peneliti mendasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi dsb. Cuplikan tidak digunakan dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau sekedar mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam teknik *purposive sampling* unsur kedalaman informasi sangat ditekankan, bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Patton dalam H. B Sutopo, 2002: 56).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (H.B. Sutopo, 2006: 75). Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang kenyataan yang berhubungan dengan kinerja BPS dalam pendataan RTS program Raskin.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan mengenai fenomena-fenomena yang diteliti dengan tidak ikut dalam peristiwa atau kegiatan yang diamati secara langsung.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data dari informan sebagai sumber data yang sangat penting, maka dalam penelitian ini diperlukan wawancara secara mendalam (*in-depth interviewing*). Dalam melakukan wawancara mendalam situasi yang akrab selalu diusahakan dan dikembangkan dan menghindari situasi tanya jawab seperti dalam proses interogasi.

Dalam H. B Sutopo (2002:58) tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para

commit to user

pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan pegawai Badan Pusat Statistik Surakarta, Pengurus Raskin di wilayah Kelurahan, Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program Raskin (RTS).

3. Dokumentasi

Dokumentasi secara tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki fungsi penting dalam penelitian kualitatif. (H.B.Sutopo, 2006:80). Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari arsip atau dokumen dari instansi yang bersangkutan serta dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pendataan RTS program Raskin. Selain itu juga menggunakan data yang bersumber dari buku kepustakaan, hasil penelitian dan arsip/dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Validitas Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Validitas yang dimaksudkan

sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan di lokasi penelitian.

Menurut Patton (Lexy Moleong, 2002:178-179) triangulasi dibagi menjadi 4 yakni :

1. Triangulasi Sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi metode, dengan menggunakan dua strategi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama;
3. Triangulasi peneliti, yakni dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan;
4. Triangulasi Teori, yakni melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang berbeda.

Untuk meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data (triangulasi sumber). Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Teknik triangulasi data atau sumber memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti bisa memperoleh dari narasumber (manusia) yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari

narasumber lainnya H.B.Sutopo (2002:79). Hal ini berarti data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda sehingga data yang diperoleh akan lebih teruji kebenarannya

G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian deskriptif sering merupakan bagian yang tersulit bagi para peneliti. Dalam analisis data seorang peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengolah hasil penelitian menjadi data yang akurat, dimana data yang diperoleh harus dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyusun, menyimpulkan serta menjawab persoalan yang diajukan sebagai hasil penelitian itu.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. Sutopo (2002:94-96), ketiga komponen tersebut adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Dimulai dari kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan (H.B Sutopo, 2006:114)

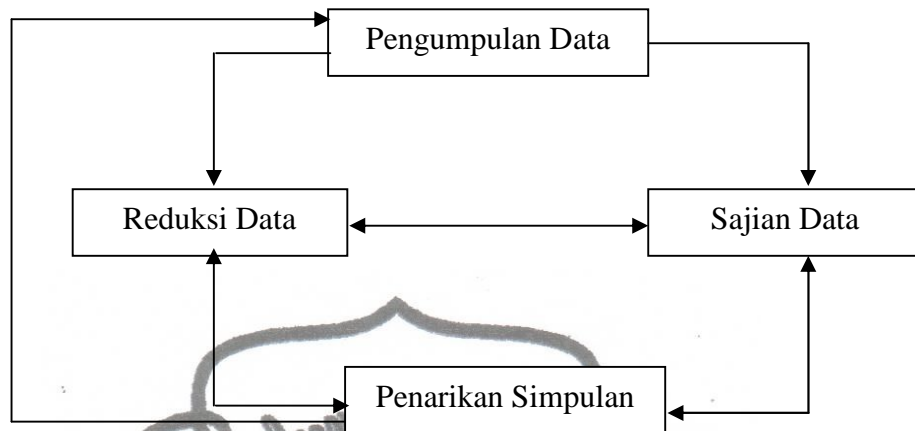
2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Kedalaman dan kemantapan hasil analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian datanya (H.B Sutopo, 2006:114-115).

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi sehingga terjadi kesimpulan akhir. Simpulan itu pun perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan (H.B Sutopo, 2006:116).

Proses analisis data dengan menggunakan model interaksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Model Analisis Interaktif

(Sumber: H.B. Sutopo, 2006:120)

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi

1. Sejarah BPS Kota Surakarta

Berdasarkan sejarah dari kegiatan statistik juga latar belakang adanya BPS Indonesia, BPS mempunyai beberapa tingkatan dari tingkatan terendah sampai dengan tingkatan teratas atau pusat. Tingkatan tersebut yaitu :

- a. BPS Pusat
- b. BPS Propinsi
- c. BPS Kabupaten/Kota
- d. BPS Kecamatan

Dengan adanya otonomi daerah, maka pembangunan daerah-daerah pun perlu ditingkatkan. Karena data sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam pembangunan, maka di setiap kabupaten/kota didirikan BPS kabupaten/kota sebagai wakil dari masing-masing kabupaten/kota dalam peningkatan pembangunan.

BPS kota Surakarta ini mempunyai tugas mengadakan penyediaan dan pengolahan data yang mencakup daerah Surakarta. Data tersebut berupa data hasil dari survey di lapangan maupun data yang sudah dibukukan yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan.

2. Visi dan Misi

Visi BPS Kota Surakarta adalah penyedia statistik berkualitas. Sebagai perwujudan untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Surakarta yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyediakan informasi statistik yang berkualitas : lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

3. Tujuan dan Sasaran

Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, dan mutakhir pada skala daerah dan nasional bagi para pengguna data dan *stakeholder*.
- b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistik yang tepat guna dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang statistik serta terselenggaranya *good governance*.

commit to user

Sedangkan sasaran pembangunan statistik adalah :

- a. Meningkatnya daya guna statistik.
- b. Semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kesil dan spesifik daerah.
- c. Meningkatnya fungsi SSN.
- d. Semakin memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
- e. Terwujudnya *good governance*.

4. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah kedudukan BPS yaitu :

- a. BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Propinsi.
- b. BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota.

- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan di kabupaten/kota.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPS Kota Surakarta mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan rencana daerah di kabupaten/kota secara makro di bidang statistik.
- b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di daerah kabupaten/kota.
- c. Penetapan sistem informasi statistik di kabupaten/kota.
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di kabupaten/kota
- e. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kota Surakarta dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik menjamin hukum bagi penyelenggara dan penggunaan statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini

commit to user

maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- c. Keputusan Presiden republic Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- d. Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Saerah.

6. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

BPS Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan susuna organisasinya terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain :
 - 1) Menyusun program kerja tahunan Subbagian Tata Usaha.
 - 2) Melakukan persiapan bahan dan penyusunan rancangan usulan program kerja dan anggaran tahunan BPS Kabupaten/Kota baik rutin maupun proyek dan menyampaikan ke BPS Propinsi.

commit to user

- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan ketatausahaan.
- 4) Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- 5) Melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pegawai, administrasi jabatan fungsional, serta penggajian.
- 6) Melakukan kegiatan tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran.
- 7) Melakukan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan gedung, keamanan dan ketertiban lingkungan, perjalanan dinas, serta penggandaan/percetakan.
- 8) Melakukan kegiatan penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis dan pelatihan administrasi.
- 9) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 10) Membantu kepala BPS Kabupaten/kota dalam melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan laporan tahunan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan pelaksanaan program kerja lainnya, berkerjasama dengan satuan organisasi terkait.

- 11) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi lainnya kepada semua satuan organisasi di lingkungan BPS Kabupaten/Kota.
- 12) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan, pngamatan lanjut, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di BPS Kabupaten/Kota.
- 13) Melakukan penerangan kegiatan statistik dan kehumasan.
- 14) Melakukan kegiatan pendistribusian publikasi yang dihasilkan BPS Kabupaten/Kota kepada instansi terkait.
- 15) Melukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.
- 16) Menyusun laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara berkala dan sewaktu-waktu.
- 17) Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

b. Seksi Statistik Sosial, yang mempunyai tugas meliputi :

- 1) Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Sosial.
- 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk tugas pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan social, serta kegiatan statistik social lainnya yang ditentukan.
- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik sosial.

- 4) Membantu Kepala BPS Kabupaten/kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan kegiatan statistik sosial.
- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik sosial.
- 6) Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
- 7) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik sosial.
- 8) Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan system dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- 9) Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan data statistik sosial yang akan dikirim ke BPS dan atau BPS Propinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 10) Melakukan evaluasi hasil pengolahan statistik sosial sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya,
- 11) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik sosial di kabupaten/kota dan di kecamatan.
- 12) Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik sosial baik dengan Pemerintahan Daerah maupun instansi lain.

- 13) Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik sosial dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan percetakan dan penyebarannya.
 - 14) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik sosial dalam bentuk buku publikasi.
 - 15) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik sosial.
 - 16) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
 - 17) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, coordinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik sosial.
 - 18) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik Sosial.
 - 19) Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Sosial.
 - 20) Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Sosial secara berkala dan sewaktu-waktu.
 - 21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- c. Seksi Statistik Produksi, mempunyai tugas yang meliputi :
- 1) Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Produksi.
 - 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan statistik pertanian,

industri, pertambangan, energy, konstruksi, serta kegiatan statistik lainnya yang ditentukan.

- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik produksi.
- 4) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan.
- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan kegiatan statistik produksi.
- 6) Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
- 7) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik produksi.
- 8) Melakukan pengolahan data statistik produksi sesuai dengan system dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- 9) Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik produksi yang akan dikirim ke BPS dan atau ke BPS dan atau BPS Propinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 10) Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik produksi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- 11) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan dan statistik produksi di kabupaten/kota dan di kecamatan.

- 12) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik produksi baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
 - 13) Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik produksi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
 - 14) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan, penyusunan, publikasi statistik produksi dalam bentuk buku publikasi.
 - 15) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik produksi.
 - 16) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
 - 17) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, coordinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
 - 18) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik Produksi.
 - 19) Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik Produksi.
 - 20) Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik Produksi secara berkala dan sewaktu-waktu.
 - 21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- d. Seksi Statistik Distribusi.
- 1) Menyusun program kerja tahunan Seksi Statistik Distribusi.

- 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan statistik harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan harga produsen, niaga dan jasa, serta kegiatan statistik distribusi lainnya yang ditentukan.
- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik distribusi.
- 4) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan.
- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- 6) Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- 7) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik distribusi.
- 8) Melakukan pengolahan data statistik distribusi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
- 9) Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan statistik distribusi yang akan dikirim ke BPS dan atau ke BPS dan atau BPS Propinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 10) Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik distribusi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

- 11) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan dan statistik distribusi di kabupaten/kota dan di kecamatan.
- 12) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik distribusi baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
- 13) Melakukan penyiapan naskah publikasi statistik distribusi dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
- 14) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan, penyusunan, publikasi statistik distribusi dalam bentuk buku publikasi.
- 15) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan mengembangkan statistik distribusi.
- 16) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- 17) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, coordinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik distribusi.
- 18) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Statistik distribusi.
- 19) Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Statistik distribusi.
- 20) Menyusun laporan kegiatan Seksi Statistik distribusi secara berkala dan sewaktu-waktu.

21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

e. Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik, mempunyai tugas meliputi:

- 1) Menyusun program kerja tahunan Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik.
- 2) Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lainnya yang ditentukan.
- 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca wilayah analisis statistik.
- 4) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan.
- 5) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- 6) Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah.
- 7) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data neraca wilayah.
- 8) Melakukan pengolahan data neraca wilayah sesuai dengan system dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.

- 9) Melakukan penyiapan dokumen dan atau hasil pengolahan neraca wilayah yang akan dikirim ke BPS dan atau ke BPS dan atau BPS Propinsi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 10) Melakukan penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sector.
- 11) Melakukan evaluasi hasil kegiatan neraca wilayah sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- 12) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan pencacah, pengawas, pemeriksa, serta pengumpul data neraca wilayah di kabupaten/kota dan di kecamatan.
- 13) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
- 14) Melakukan kegiatan penyiapan dan penghimpunan bahan serta penyusunan naskah publikasi statistik berkala sesuai bentuk baku yang ditetapkan serta menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
- 15) Melakukan penyiapan naskah publikasi neraca wilayah dan menyampaikan ke satuan organisasi terkait untuk pelaksanaan pencetakan dan penyebarannya.
- 16) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan, penyusunan, publikasi neraca wilayah dalam bentuk buku publikasi.
- 17) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan mengembangkan neraca wilayah dan analisis statistik.

- 18) Membantu Kepala BPS Kbaupaten/Kota dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik.
 - 19) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam koordinasi lapangan dengan pihak kecamatan, coordinator kecamatan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
 - 20) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
 - 21) Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.
 - 22) Menyusun laporan kegiatan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu.
 - 23) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- f. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, mempunyai tugas dan fungsi :
- 1) Menyusun program kerja tahunan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.
 - 2) Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi.
 - 3) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi statistik.
 - 4) Melakukan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta menyusun sistem pengelolaan dan melakukan

pengolahan data dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.

- 5) Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistik termasuk sarana pendukungnya.
- 6) Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- 7) Melakukan kajian dan evaluasi kebutuhan pengolahan data termasuk bahan computer, statistik sektoral, dan statistik khusus.
- 8) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan rujukan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.
- 9) Melakukan penerimaan, pengelolaan, serta pengolahan semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik dan penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan statistik
- 10) Melakukan penyusunan serta evaluasi meta data untuk rujukan statistik.
- 11) Melakukan komplikasi rancangan teknis survey statistik sektoral instansi pemerintah lain serta membahas dengan satuan organisasi terkait sesuai dengan asas pembakuan dan manfaat.
- 12) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam mengatur dan menyiapkan konsep rekomendasi sebagai bahan pelaksanaan survey statistik sektoral bagi instansi pemerintah lain, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.

- 13) Melakukan kompilasi naskah dari satuan organisasi di lingkungan BPS Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy untuk dijadikan naskah publikasi siap cetak.
- 14) Membantu Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam mengatur dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi publikasi yang diterbitkan.
- 15) Melakukan penyusunan prosedur penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan informasi statistik dan konsultasi statistik, serta sosialisasi, dan penyebarluasan dan pemasyarakatan pengguna produk informasi.
- 16) Melakukan pengelolaan bahan pustaka dan dokumen statistik sesuai dengan pedoman yang ditentukan.
- 17) Melakukan penyusunan penyiapan bahan, pemeliharaan data dan peta untuk pemetaan, serta kerangka contoh induk termasuk datanga untuk keperluan sistem informasi geografis, rancangan survey dan sensus bekerja sama dengan satua organisasi terkait.
- 18) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
- 19) Melakukan pemantauan perubahan wilayah adminstrasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah setempat dan menyampaikannya ke datuan organisasi terkait secara berkala dan sewaktu-waktu.
- 20) Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di lingkungan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.

21) Menyusun laporan kegiatan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik secara berkala dan sewaktu-waktu.

22) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

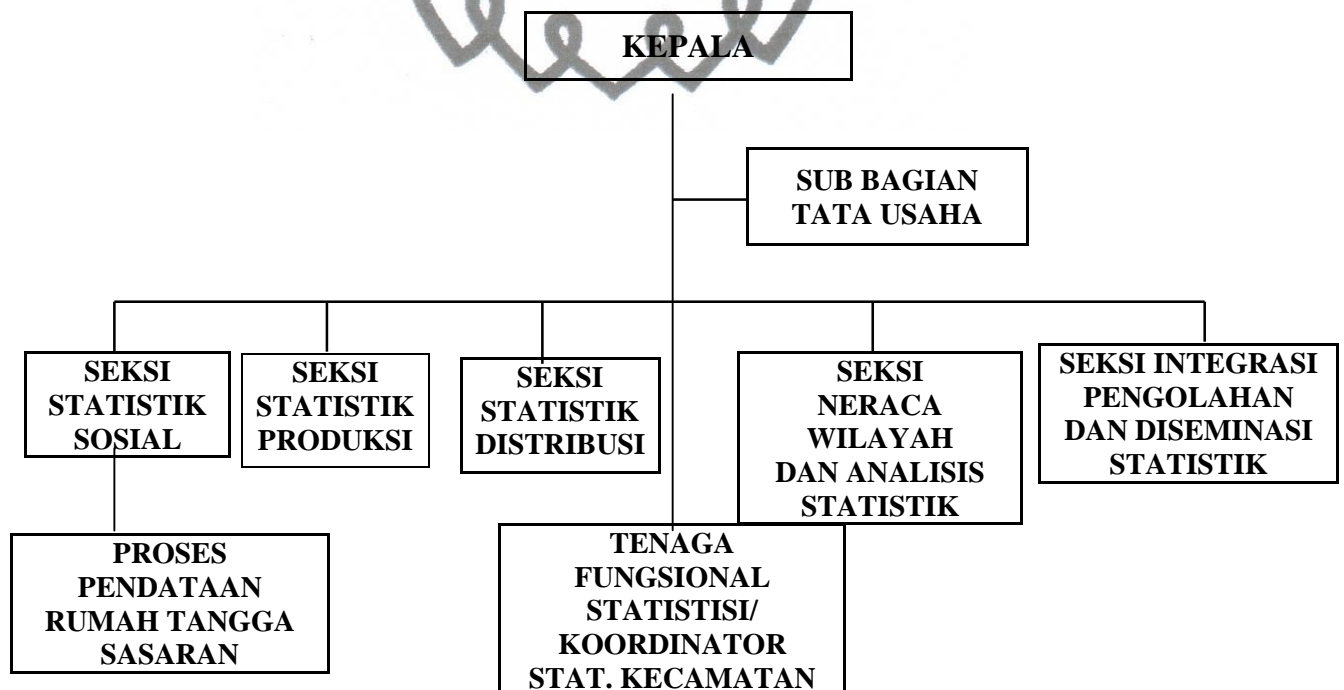
g. Kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Koordinator Statistik Kecamatan.

Tugas Koordinator Statistik Fungsional antara lain :

- 1) Mengikuti pelatihan kegiatan survey, sensus, dan kegiatan statistik lainnya sesuai ketentuan.
- 2) Melakukan pengumpulan data statistik secara langsung dan menghimpun data statistik yang dihasilkan oleh petugas instansi lain yaitu berupa data sekunder sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyerahkan hasil pengumpulan data kepada pemeriksa/petugas yang ditunjuk sesuai dengan kelengkapan dokumen, kualitas, jenis, dan jadwal yang ditetapkan.
- 4) Melaksanakan pencacahan ulang karena adanya kesalahan setelah dilakukan pemeriksaan.
- 5) Membantu pelaksanaan pengadaan petugas lapangan/mitra Statistik untuk kegiatan sensus, survey, dan kegiatan statistik lainnya.
- 6) Membantu camat dalam melaksanakan pembinaan statistik desa, registrasi penduduk, dan statistik dasar lainnya.
- 7) Melakukan kerja sama dengan petugas lain di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan statistik.
- 8) Mengikuti pelatihan/kursus dasar statistik dan pelatihan /kursus penjenjangan lainnya yang ditetapkan.

- 9) Membantu camat dalam menyiapkan publikasi Kecamatan Dalam Angka dan publikasi statistik lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 10) Menyerahkan semua hasil kegiatan yang telah ditetapkan.
- 11) Koordinator Statistik Kecamatan dalam menjalankan tugasnya secara teknis dan administrative bertanggungjawab kepada kepala BPS Kabupaten/Kota yang membawai kegiatannya dan berkoordinasi dengan camat setempat.
- 12) Menyusun laporan kegiatan Koordinator Statistik Kecamatan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- 13) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta
Berdasar SK Kepala BPS No. 121 Tahun 2001



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2010

commit to user

7. Identifikasi Pegawai

Identifikasi pegawai merupakan gambaran mengenai keadaan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta. Berikut ini disajikan identifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan kepangkatan / golongan.

1. Struktur pegawai berdasarkan jenis kelamin

Struktur pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini, dimana jumlah pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta secara keseluruhan sampai pada bulan September 2010 adalah sebanyak 23 orang dan semuanya sudah berstatus PNS.

Tabel 2.1

Struktur Kepegawaian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2010

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	16
Perempuan	7
JUMLAH	23

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih dominan dibanding dengan jumlah pegawai perempuan.

2. Struktur pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal

Untuk mendukung terwujudnya kinerja yang baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta dapat dilihat melalui beberapa program kerjanya, maka diperlukan beberapa pegawai yang memiliki keahlian dan kemampuan yang cukup, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan

baik. Keadaan ini akan tercermin dari latar belakang pendidikan yang mereka miliki.

Berdasarkan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh, pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta terbagi kedalam jenjang pendidikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Struktur Kepegawaian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta
Berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2010

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	3
2.	Sarjana (S1)	10
3.	Diploma (D3)	1
4.	SLTA	8
5.	SLTP	1
6.	SD	-
	JUMLAH	23

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2010

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta mayoritas berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 10 orang dari total pegawai yang berjumlah 23 pegawai. Keadaan ini sebenarnya sudah merupakan standarisasi pendidikan pegawai dalam sebuah instansi karena dianggap sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Sedangkan jumlah terbesar kedua adalah pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA yaitu sebanyak 8 orang. Diharapkan dengan kualitas pegawai yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Surakarta saat ini akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Struktur pegawai berdasarkan Kepangkatan / Golongan

Pegawai Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta terbagi kedalam beberapa pangkat / golongan sebagaimana mestinya layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berikut ini tabel pegawai Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta berdasarkan kepangkatan atau golongan :

Tabel 2.3
Struktur Kepegawaian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta
Berdasarkan Pangkat / Golongan pada Tahun 2010

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	-
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk.I (III/d)	6
4	Penata (III/c)	5
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	3
6	Penata Muda (III/a)	2
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1
8	Pengatur (II/c)	1
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
10	Pengatur Muda (II/a)	3
11	Juru (I/a)	1
	JUMLAH	23

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, pegawai yang memiliki jangkauan golongan tertinggi adalah golongan IV/a, dan jangkauan golongan yang paling rendah adalah golongan I/a. Jumlah pegawai paling banyak adalah pegawai dengan golongan III/d.

B. Hasil Penelitian

Kinerja Organisasi Publik merupakan gambaran hasil kerja suatu instansi pemerintah dalam bidang tertentu yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi dalam bidang tersebut. Kinerja organisasi publik sangat penting untuk mengetahui / mengukur tingkat pencapaian hasil suatu instansi publik sehingga dapat diketahui sejauh mana pemerintah telah bekerja untuk masyarakat.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu, penilaian organisasi dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kinerja yang optimal diwujudkan oleh organisasi publik dimana kinerja tersebut memuat indikator-indikator pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilannya. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai kinerja Badan Pusat Statistik dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran Program Raskin. Untuk mengukur kinerja BPS dalam pendataan RTS tersebut peneliti menggunakan indikator kinerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu indikator

kinerja teknis, yang terdiri dari kesesuaian indikator, akurasi, dan ketepatan waktu (timeliness).

Sebelum membahas tentang ketiga indikator tersebut, akan dibahas terlebih dahulu tentang kinerja BPS secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, indikator kinerja, yang keseluruhannya dikaitkan dengan pendataan Rumah Tangga Sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggara statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, BPS Surakarta menyelenggarakan fungsinya antara lain mengadakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota, mengadakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota, mengadakan pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan di kabupaten/kota, serta melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota.

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik, dalam program Raskin ini Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta bertindak sebagai instansi pemerintah yang melakukan pendataan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang nantinya digunakan sebagai acuan

jumlah penerima Raskin di Kota Surakarta. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

“Kita hanya bertugas buat mendata-data saja mbak. Kalau urusan tentang Raskin yang lebih lengkap kan itu yang mengurus dari Kesranya langsung ya, jadi ya kita cuma ditugaskan buat mendata itu tadi mbak. Dan itu emang dari pusat.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Pelaksanaan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi BPS, Inpres No.3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Salah satu landasan hukum yang digunakan tersebut justru berkaitan dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dikarenakan kriteria yang digunakan untuk data RTS kedua program tersebut sama. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

“Iya mbak, memang kriteria yang digunakan untuk menentukan jumlah penerimanya itu sama. Jadi landasan hukum yang digunakan malah justru berkaitan dengan BLT.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Leni, staff Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

“Memang mbak bukan suatu permasalahan yang penting kenapa landasan hukum tentang pendataan Raskin ini justru malah menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan BLT. Semua kan yang menentukan pusat, jadi ya kita tinggal melaksanakan aja. Dan memang kriteria RTS-nya itu emang hampir sama, bukannya hampir lagi, tapi memang sama.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut melalui proses yang tidak singkat, ada proses yang panjang dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Herminawati, selaku Kepala Seksi Statistik BPS Surakarta :

“Berdasarkan Undang-Undang yang ada memang BPS yang diberi kewenangan untuk mendata mbak. Tapi dalam pendataan itu ada proses yang panjang, dari BPS Pusat melatih BPS tingkat Propinsi, nanti tingkat Propinsi melatih BPS di bawahnya, begitu seterusnya.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Jadi, dalam melakukan pendataan ini, diperlukan adanya kerjasama antara BPS Pusat hingga tingkat BPS Kabupaten/Kota, begitu juga dengan BPS Surakarta. Agar pada saat proses pendataan BPS Surakarta dapat melaksanakannya dengan baik, maka BPS Surakarta terlebih dahulu diberikan pelatihan oleh BPS Provinsi.

Walaupun peran BPS Surakarta dalam pendataan RTS di Surakarta sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pendataan, dalam kenyataannya BPS Surakarta tidak bekerja sendiri melainkan ada mitra kerja yang bekerjasama dengan pihak BPS dalam pendataan. Mitra kerja BPS tersebut diambil dari wilayah kelurahan-kelurahan di Surakarta. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik BPS Surakarta :

“Untuk melakukan pendataan ini, BPS dibantu yang namanya mitra kerja, kenapa dinamakan mitra kerja karena setiap ada kegiatan pendataan seperti itu mereka yang selalu ikut andil. Tim ini terdiri dari BPS dan non BPS. Kalau yang BPS kan orang dalam, nah kalau non BPS itu macam-macam mbak. Ada yang ibu rumah tangga, mahasiswa, macam-macam. Biasanya mitra kerja itu dari kelurahan, kita minta ke kelurahan, nanti kelurahan yang merekrut siapa saja yang ikut, tapi kita sampaikan kriteria apa saja,

commit to user

kelurahan yang menentukan gitu mbak. Tapi biasanya mitra kerja yang ikut ya yang sudah biasanya ikut kegiatan-kegiatan kaya' gitu.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Selanjutnya terkait dengan kinerja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu instansi pemerintahan. Seperti misalnya, faktor personal/individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual (situasi). Begitu pula yang terjadi di BPS Surakarta. Kinerja karyawan dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas.

Faktor personal/individu meliputi pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam proses pendataan RTS ini, diperlukan karyawan/individu yang memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan dalam bidangnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik Sosial :

”Untuk pelaksanaan lapangan seperti misalnya pendataan kayak gini ini mbak, biasanya pegawai yang diterjunkan itu semua, tapi yang terjun ke lapangan langsung karyawan yang kita anggap mampu untuk di lapangan. Yang lebih mengerti situasi lingkungan gitu lah mbak istilahnya. Kan kalau di lapangan kerjanya lebih berat.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Faktor selanjutnya adalah faktor kepemimpinan. Faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*. Dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) ini, faktor kepemimpinan sangat penting, karena dalam pelaksanaannya seorang pemimpin membawahi beberapa staff/karyawan yang terlibat langsung di lapangan. Sehingga seorang pemimpin yang mampu

memberikan arahan dan menjalin hubungan kerjasama dengan baik kepada karyawannya akan berimbas baik pada hasil kerja.

Begitu pula yang terjadi di BPS Surakarta, proses pendataan ini dapat berhasil dengan baik karena faktor pemimpin. Pelaksanaan pendataan terdiri dari tim-tim yang bertugas ke lapangan. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam hal ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Herminawati :

”Biasanya kepala Dinas itu hanya mengecek saja gimana kondisi pada waktu proses pendataan itu. Tapi ya nggak terlibat secara mendalam mbak, karena kan sudah ada koordinator lapangan yang bertugas, jadi atasan hanya memantau saja.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Faktor yang ketiga adalah faktor tim. Faktor ini meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim. Dalam pelaksanaan pendataan Rumah Tangga Sasaran ini, faktor tim sangat diperlukan karena dalam pelaksanaannya di lapangan terdiri dari tim-tim yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga untuk menghasilkan hasil kerja yang baik diperlukan rasa kepercayaan, kekompakan, dan dukungan antara sesama anggota tim pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

”Proses pendataan ini kan dibentuk tim-tim mbak, jadi ya antar anggota tim harus saling membantu. Kalau emang misalnya ada masalah, ya harus diselesaikan dulu. Karena nanti bisa mengganggu jalannya proses pendataan.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Faktor yang selanjutnya adalah faktor sistem. Faktor ini meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses

organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. Dalam proses pendataan ini faktor sistem juga sangat membantu, karena setelah diperoleh data dari lapangan, hasilnya tersebut akan diolah terlebih dahulu sebelum kemudian diserahkan ke daerah-daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Herminawati, kepala Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

”Setelah diperoleh hasil, diolah dulu. Setelah kuesioner diisi, diberi tanda yang dinamakan proses koding. Nanti yang sudah diolah dalam bentuk koding yang dikirim ke pusat. Prosesnya itu panjang mbak, diisi, dikoding, dientri, dikirim ke provinsi, digabung baru kemudian dikirim ke pusat.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Faktor yang terakhir adalah faktor kontekstual (situasi). Faktor tersebut meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS), faktor kontekstual juga berpengaruh. Faktor internal bisa dari waktu yang diberikan, semakin cepat dan tepat hasil yang diperoleh akan semakin baik.

1. Proses Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Permasalahan kemiskinan mengakibatkan banyak hal yang ditimbulkan seperti contohnya, orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya, banyak warga yang masih hidup serba kekurangan, bahkan masih banyak pula warga miskin yang tidak mampu membeli beras untuk makan sehari-hari. Fenomena ini sebagai akibat dari semakin tingginya angka kemiskinan dan semakin mahalnya harga bahan-bahan pokok.

Melihat masalah sosial berupa kemiskinan diatas, maka untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi, sudah banyak strategi

penanggulangan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Raskin (Beras untuk orang miskin). Begitu pula seperti yang dilaksanakan di kota Surakarta, Pemkot melaksanakan Program Raskin untuk membantu masyarakat miskin di Surakarta kota melalui BULOG Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan Program Raskin ini, tidak semua orang berhak mendapatkan subsidi beras dari Pemerintah. Terdapat kriteria-kriteria tertentu mengenai siapa saja yang berhak sebagai penerima manfaat. Terdapat beberapa kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima subsidi beras dari Pemerintah. Rumah Tangga Miskin tersebut adalah jumlah warga miskin yang dijadikan sasaran dalam pembagian Raskin atau yang biasa disebut Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta diberikan tugas oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sesuai dengan tugas dari BPS yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pendataan nasional tersebut berlandaskan hukum Undang-undang Statistik.

Hal diatas sesuai dengan penuturan Ibu Herminawati selaku Kepala Seksi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Surakarta adalah sebagai berikut :

“Dalam melakukan pendataan untuk RTS ini memang dari Pemerintah Pusat. Ini merupakan Pendataan Nasional yang Dasar Hukumnya Undang-Undang Statistik dari Pemerintah Pusat kalau tidak salah itu ada 5 (lima) mbak. Itu ada di buku Pedoman Pencacah PPLS08.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dalam buku pedoman pencacah PPLS08 tersebut disebutkan dasar hukum yang melandasi dilaksanakannya pendataan Rumah Tangga Sasaran tersebut.

Landasan hukum yang mendasari PPLS08 tersebut :

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi BPS.
10. Inpres No.3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Salah satu landasan hukum tersebut berkaitan dengan Program Bantuan Langsung Tunai bukan Program Raskin. Hal ini karena Rumah Tangga Sasaran program BLT sama dengan Rumah Tangga Sasaran program Raskin.

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam program Raskin tersebut, peran Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta dalam program Raskin ini hanya untuk melakukan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Selain itu tidak ada peran lain yang diberikan kepada BPS. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati :

“Kalau untuk masalah peran BPS dalam Raskin nggak ada mbak. Cuma biasanya kalau ada yang tanya ya kita kasih tau, tapi kalau tentang Raskinnya sendiri BPS tidak berperan secara khusus. Tugas kita menyajikan data informasi kepada pemerintah. Tugas BPS membantu pemerintah ”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Untuk melakukan pendataan Rumah Tangga Sasaran tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta dibantu oleh beberapa pihak yang dinamakan mitra kerja BPS. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Herminawati, kepala Seksi Statistik Sosial :

“Yang melakukan itu BPS dan mitra kerja BPS mbak, biasanya kita minta ke kelurahan, nanti kelurahan yang merekrut, kita sampaikan kriterianya seperti apa, kelurahan yang menentukan.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Siswandi, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasarkliwon :

“Mitra kerja BPS itu sifatnya perorangan mbak, jadi memang kelurahan yang memilih, tapi sifatnya tetap perorangan. Bukan dari instansi/lembaganya. Biasanya ya mahasiswa, pegawai kelurahan juga ada tapi ya cuma sebagian aja, nggak semuanya mbak. Tapi kelurahan tetap berperan ikut membantu.”
(Sumber : wawancara 29 September 2010)

Terkait dengan peran Kecamatan terhadap Program Raskin, Bapak Siswandi mengatakan :

“Kalau peran kecamatan dalam Raskin ini sebagai Satgas Raskin. Pendataan itu langsung dari BPS melalui kelurahan sebagai mitra kerja pendataan.”
(Sumber : wawancara 29 September 2010)

Dari pendapat diatas, dapat diketahui dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS), BPS Surakarta dibantu oleh mitra kerja terdiri dari berbagai kalangan yang dipilih oleh Kelurahan. Sehingga peran kecamatan tidak begitu sentral dalam program pendataan Raskin. Berbeda dengan kelurahan sebagai mitra kerja BPS yang langsung turun ke lapangan untuk mendata Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sesuai dengan kriteria-kriteria dari pusat. Hal ini disebabkan

antara lain karena kelurahan adalah instansi formal pemerintah yang paling sering berinteraksi langsung dengan warga terkait program-program dari Pemerintah.

2. Kinerja BPS dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Selanjutnya tentang proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilaksanakan oleh BPS Surakarta tersebut dilaksanakan oleh BPS dengan cara BPS terjun langsung ke lapangan dan pelaksanaannya dengan membentuk tim-tim di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

“Pelaksanaannya itu kita terjun langsung mbak, pelaksanaannya ada tim dalam. Petugas dibagi jadi 2, BPS dan non BPS. BPS itu orang-orang dalam dan non BPS itu mitra kerja BPS. Ibu rumah tangga, mahasiswa, dll. Ditentukan BPS jumlahnya berapa, nanti kelurahan yang menentukan.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa dalam pendataan ini, BPS memang membutuhkan bantuan untuk melaksanakannya. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah kerja BPS yang harus mendata seluruh warga Surakarta dengan jumlah pegawai yang terbatas. BPS menunjuk mitra kerja yaitu kelurahan untuk mengolah data-data penduduk yang nanti dapat diajukan sebagai RTS / penerima Program Raskin. Disinilah fokus kinerja BPS dalam pendataan program Raskin, data-data yang didapat dari kelurahan akan diolah ulang untuk dikonfirmasi sesuai data-data sebelumnya, apakah data tersebut sudah valid sesuai dengan kriteria RTS Program Raskin. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data-data yang diolah tersebut telah benar-benar terseleksi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Pendataannya tersebut dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta setiap 3 Tahun sekali dan itu baru dimulai pada tahun 2005. Setiap tahunnya BPS melakukan update, seperti yang disampaikan oleh Ibu Herminawati, Kepala Seksi Statistik Sosial :

“Tiap tahun kita melakukan update mbak, tapi tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten atau kota untuk mengupdate atau tidak. Kalau dari BPS nanti Tahun 2011 ada update lagi.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program Raskin tersebut telah ditentukan kriteria-kriteria siapa saja yang berhak untuk mendapatkan raskin dari pemerintah. Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2008 ada 14 kriteria yang digunakan untuk mendata RTS Program Raskin. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Herminawati :

“ Empat belas kriteria yang digunakan itu ditentukan oleh pusat mbak, mulai dari Aceh sampai Papua sama semua. Tapi muncul kriteria masing-masing karena walaupun dari pusat sudah ditentukan tapi untuk tiap daerah standarnya yang beda“

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Leni, staff Seksi Statistik Sosial BPS Surakarta :

“ Kriteria yang digunakan itu nasional. Dari pusat sampai ke daerah-daerah sama. Tapi hanya point-pointnya saja yang berbeda. Misalnya standar air minum di Solo sama di Lampung. Itu jelas sudah berbeda mbak.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa memang kriteria yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) ini sama mulai dari pusat hingga daerah hanya saja berbeda standarnya antara daerah yang satu dengan yang lain.

Untuk menentukan keempat belas kriteria penerima raskin tersebut melalui beberapa langkah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengamati di lapangan lalu hasilnya disampaikan kepada pemerintah pusat dan pada akhirnya pemerintah pusat yang akan menentukan nama-nama penerima berdasarkan keempat belas kriteria tersebut.

Terkait dengan penilaian kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta dalam melaksanakan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) ini ada beberapa indikator kinerja yang digunakan oleh BPS Surakarta. Indikator-indikator tersebut antara lain :

a. Kesesuaian Indikator

Program Raskin yang dilaksanakan Pemerintah merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam program ini, pemerintah menyalurkan beras yang diberikan dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan Program Raskin ini juga merupakan salah satu program Pemerintah yang dapat meningkatkan pembangunan di Indonesia.

Terkait dengan Program Raskin yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, Badan Pusat Statistik mempunyai andil untuk ikut menyukseskannya dengan berperan sebagai instansi yang melaksanakan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Jumlah Rumah Tangga (RTS) yang didata adalah jumlah warga miskin yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria-kriteria seperti yang telah disebutkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran itu sudah tepat sasaran dalam arti Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang didata tersebut adalah benar-benar orang yang membutuhkan dan dilakukan secara update. Apabila hal itu yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta sudah benar dan sesuai dengan salah satu tujuan Program Raskin yaitu berperan dalam pembangunan khususnya pembangunan di bidang pangan.

Berkaitan dengan penilaian kinerja tentang kesesuaian indikator maka dalam penelitian ini memakai indikator kemiskinan yang sesuai dengan visi misi Program Raskin tersebut. Seperti yang diungkapkan Ibu Herminawati :

“Indikator-indikator yang digunakan dalam pendataan RTS ya seharusnya yang sesuai dengan fenomena kemiskinan, kan tujuan Raskin itu untuk mengurangi kemiskinan mbak.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dari uraian diatas bahwa yang digunakan dalam proses pendataan RTS adalah indikator kemiskinan. Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2008, dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran ada 14 kriteria yang harus diperhatikan untuk menjadi RTS. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Herminawati :

“Untuk menentukan penerima Raskin, ada 14 kriteria miskinnya mbak, itu sudah ditetapkan sesuai Inpres No.3 Tahun 2008. Itu berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Kriteria itu seperti misalnya luas lantai, fasilitas buang air besar, jenis lantai, sumber air minum, pendidikan, tingkat konsumsi, dan lain sebagainya”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Dari keempat belas kriteria yang dimaksud, paling tidak memenuhi Sembilan kriteria sudah dikatakan miskin. Sehingga sudah 50% lebih masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin.

Dalam 14 kriteria tersebut, maka BPS dalam kinerjanya mendata RTS secara tidak langsung juga akan mengarah pada evaluasi pembangunan yang progresif, khususnya di bidang pangan. Hal tersebut dikarenakan BPS dalam kinerjanya juga memakai indikator yang sering berinteraksi dengan pembangunan bangsa Indonesia yaitu indikator kemiskinan. Memang fenomena kemiskinan sangat erat kaitannya dengan bangsa Indonesia dan ini menjadi tugas berat bagi Pemerintah. Lewat Program Raskin inilah, pemerintah berharap banyak pada BPS Surakarta untuk memaksimalkan kinerja pendataan RTS agar implementasi Program Raskin tepat sasaran sehingga menghasilkan output yang efektif bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Surakarta pada khususnya.

b. Akurasi Data

Akurasi data berkaitan dengan kesesuaian data yang dihasilkan dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dan juga kesesuaian dengan kriteria miskin yang telah ditentukan. Dalam pendataan yang dilakukan BPS Surakarta ini, keakuratan data sangatlah diperlukan, karena pada akhirnya data yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk pembagian Raskin kepada masyarakat miskin.

Standar miskin untuk tiap daerah di Indonesia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Begitu pula yang terjadi di kota Surakarta, seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati :

“ Di Solo itu dari keempat belas kriteria masuk Sembilan itu dah miskin mbak. Sebenarnya ada sebagian yang kurang dari Sembilan, tapi hanya mencapai 5.000 orang. Kalau masuk 25.000 itu bukan lagi mendekati, tapi sudah memenuhi syarat.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) di Surakarta haruslah terjun ke lapangan. Di Kota Solo, ada beberapa kriteria yang lebih dominan diantara keempat belas kriteria tersebut, antara lain luas lantai, pendidikan, penghasilan, dan kepemilikan asset. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Herminawati :

“ Kriteria yang dominan di Solo itu luas lantai, pendidikan, penghasilan/ kepemilikan Asset. Kalau pendidikan, di Solo itu banyak yang masih buta huruf mbak. Penjual-penjual tu kan juga biasanya pendatang, mereka bukan asli Solo mbak, nah biasanya pendatang itu masih banyak yang pendidikannya rendah. Tapi pendukung utama ya luas lantai. Kalau seperti air, air di Solo tu dah bersih. Listrik baik, dinding juga sudah permanen.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Pernyataan Ibu Herminawati tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Siswandi, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasarkliwon :

“Yang biasanya jadi patokan itu nomor 14 mbak, tentang kepemilikan asset. Kepemilikan asset itu maksudnya tidak mempunyai tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal lima ratus ribu. “

(Sumber : wawancara 29 September 2010)

Penentuan penerima Raskin ditentukan berdasarkan 14 kriteria penerima. Begitu pula dengan yang dilakukan di Kota Surakarta. BPS Surakarta melakukan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasar keempat belas kriteria tersebut.

Sehingga data tentang jumlah penerima Raskin yang dihasilkan sesuai dengan kriteria penerima yang ditetapkan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Herminawati :

“Kita melakukan pendataan ini ya berdasar kriteria-kriteria 14 itu mbak. Luas lantai, sumber air minum, pendidikan, kepemilikan asset, dan lain sebagainya. Untuk menentukan ya itu tadi kita survey langsung ke lingkungan dengan dibantu Kelurahan.”
(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Pendapat lain juga disampaikan Bapak Siswandi terkait dengan keakuratan antara data jumlah Rumah Tangga Sasaran tersebut dengan kenyataan atau keadaan di masyarakat :

“Data penerima manfaat langsung dari BPS mbak. Sebenarnya kenyataan di wilayah masih banyak yang belum menerima tapi karena disesuaikan alokasi, maka ada di wilayah-wilayah tertentu ada istilah BAGITO (bagi roto / rata. Kalau ada yang nggak dapat ya nggak bisa complain karena disini cuma menyalurkan saja. Untuk menentukan jumlahnya biasanya yang jadi patokannya tentang kepemilikan asset.”
(Sumber : wawancara 29 September 2010)

Maksud dari istilah Bagito atau bagi rata itu adalah beras untuk jatah warga miskin yang terdaftar dikurangi jumlahnya untuk dibagikan secara merata kepada warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat Raskin tersebut.

Terkait dengan jumlah perubahan penerima Raskin setiap tahunnya, jumlah selama satu tahun sama, akan tetapi tahun selanjutnya akan berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Siswandi, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon :

“Selama satu tahun jumlahnya tetap, tapi lain tahun beda mbak. Perubahannya tidak tentu, tinggal alokasi dari Pusat. Sebenarnya alokasi Raskin tiap tahun nggak sama, tergantung jatah dari sana. Sini tinggal mendapat alokasi dari BPS.”

(Sumber : wawancara 29 September 2010)

Untuk menghasikan data yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat, BPS Surakarta dibantu oleh Kelurahan melakukan survey langsung ke masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Rejeki, penerima Raskin di daerah Pasar Kliwon :

“Ya biasanya kita ditanya-tanya sama orang dari BPS mbak. Kadang ya orang dari Kelurahan. Ya tanya-tanyanya tentang kondisi saya. Penghasilannya berapa, terus kerjanya apa, pendidikan, banyak mbak. Pokoknya ya yang nyangkut-nyangkut kondisi saya lah mbak. Kita tinggal jawab aja, wong ya memang kondisinya kayak gini kan.”
(Sumber : wawancara tanggal 30 September 2010)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dudung, penerima Raskin di daerah Jebres :

“Orang Kelurahan datang kerumah saya, terus saya ditanya-tanya mbak. Sekolah terakhir apa, penghasilan sebulan berapa, jumlah keluarga, makannya gimana. Ya banyak mbak. Biasanya kalau nggak orang kelurahan ada yang dari BPS. Kita ya tinggal jawab aja sama kayak aslinya to mbak. Nggak dibuat-buat. Buat apa bohong, wong ya memang susah. He he he..”
(Sumber : wawancara tanggal 30 September 2010)

Disinilah fokus penilaian kinerja BPS tentang akurasi data RTS Program Raskin. Walau sebenarnya pendataan RTS sesuai dengan ketentuan PPLS08 bahwa pendataan dilaksanakan 3 tahun sekali, akan tetapi BPS melakukan sebuah inovasi tersendiri untuk mengolah kualitas RTS agar lebih tepat sasaran.

Pada dasarnya proses pendataan Program Raskin dilakukan oleh BPS, akan tetapi BPS mempunyai mitra kerja (non BPS) untuk membantu pendataan tersebut. Mitra kerja tersebut ditunjuk oleh Kelurahan berdasarkan kriteria
commit to user

yang ditetapkan oleh BPS. Kelurahan sebagai instansi formal yang berhubungan langsung sebagai mitra kerja BPS dikarenakan kelurahan merupakan instansi yang paling sering berinteraksi langsung / terjun langsung ke lapangan dalam masyarakat. Sehingga Kantor Kelurahan dianggap mempunyai potensi untuk membantu kinerja BPS dalam pendataan Program Raskin.

Walau secara formal pendataan RTS dilakukan 3 tahun sekali, tetapi BPS akan mengolah data setiap 1 tahun sekali. Disinilah peran Kelurahan dalam pendataan RTS sebagai mitra kerja BPS. Jadi, setiap setahun sekali BPS bersama kelurahan akan mengevaluasi data-data penerima Raskin sehingga tingkat akurasi data yang dihasilkan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Seperti yang diungkapkan, Bapak Bambang, pegawai Kelurahan Pasarkliwon :

“ Ya kita bertugas mendata tiap tahun saja, kan mobilitas penduduk selalu berubah-ubah tiap tahun. Yang tahun ini dapat jatah Raskin belum tentu tahun depan juga dapat. Yang penting Kelurahan memantau perkembangan di lapangan. Tapi nanti datanya kita kumpulkan satu Kecamatan“

(Sumber : wawancara 29 September 2010)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kerjasama antara kelurahan (mitra kerja non BPS) dengan BPS dalam pendataan RTS bertujuan untuk meng-update validasi data dari hasil survey di lapangan sehingga tingkat akurasi data RTS akan terus stabil karena sesuai dengan sasaran. Tingkat akurasi data RTS Program Raskin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah RTS di 5 (Lima) Kecamatan Tahun 2009 dan 2010

No.	Kecamatan	Tahun	
		2009	2010
1.	Laweyan	3.211	2.915
2.	Serengan	2.145	2.099
3.	Pasar Kliwon	4.784	4.649
4.	Jebres	5.441	5.360
5.	Banjarsari	7.148	6.391
	JUMLAH	22.729	21.954

Sumber : Kecamatan se-Surakarta.

c. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Terkait dengan ketepatan waktu pendataan Rumah Tangga Sasaran, Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta diberikan waktu oleh Pemerintah Pusat mulai dari proses di lapangan hingga pengolahannya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati, selaku Kepala Seksi Statistik Sosial :

“ Waktunya pendataan itu satu bulan mbak, pengolahan satu bulan jadi totalnya 2 bulan. Itu waktunya dari Aceh sampai Papua sama, karena ditentukan pusat jadi harus sama. Tidak boleh melebihi batas waktu, harus serentak, karena kalau nggak bareng nanti sampai di pusat bisa terlambat semua mbak. Tidak ada toleransi, ow karena puasa terus diundur. Nggak bisa kayak gitu, harus sesuai dan memang kenyataannya juga begitu mbak.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Adanya pembatasan waktu tersebut menyebabkan Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta harus bekerja sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut, yaitu dua bulan. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu, hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat

commit to user

Statistik (BPS) itu diolah terlebih dahulu setelah itu baru dikirim ke pusat dan harus sudah sampai ke pusat baru kemudian dikirim ke daerah tingkat II.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Herminawati :

“ Setelah diperoleh hasilnya, baru diolah dulu. Setelah kuesioner diisi, nanti yang diolah dalam bentuk koding yang dikirim ke pusat. Prosesnya panjang, diisi, dikoding, dientri, dikirim ke provinsi digabung dulu dengan daerah lain, baru kemudian dikirim ke pusat. Jadi, sesudah di pusat menyatakan fix layak pakai baru dikirim kembali ke daerah dalam bentuk nama-nama setelah dari pusat, tapi informasi di dalamnya pakai koding. Setelah dari Tingkat II baru muncul nama, alamat dan sebagainya.”

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Data-data RTS yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya akan diolah sebelum hari H pembagian Raskin di masyarakat. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar BPS tidak kelabakan apabila suatu ketika terjadi pendataan ulang Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dengan ditetapkannya waktu pendataan ini, diharapkan nantinya pada saat hari H pembagian Raskin di masyarakat sesuai dengan jumlah yang ada di masyarakat, sehingga hal ini dapat menghindarkan dari protes masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Herminawati :

“ Bisa nggak bisa ya pendataan ini harus selesai sebelum pembagian mbak. Kan emang waktunya sudah ditentukan, jadi nggak bisa diundur-undur begitu saja. Semua kan emang sudah diatur. “

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Pendataan yang dilaksanakan sebelum waktu pembagian dengan hasil yang sesuai di masyarakat ini akan mendukung kelancaran Program Raskin, karena protes dapat dihindarkan dan tentunya apa yang diharapkan dari Program Raskin ini akan tercapai sesuai sasaran. Untuk menciptakan proses pendataan yang tepat sasaran dan tepat waktu, BPS melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan pihak Kelurahan sebagai mitra kerja BPS. Hal ini

tentunya untuk membantu agar pendataan RTS tersebut selalu update dan apabila ada perubahan di masyarakat agar segera dilakukan perubahan. Koordinasi ini juga untuk mengantisipasi apabila terdapat RTS “susulan” dapat segera dilakukan perubahan, karena data yang lewat tanggal pelaksanaan dianggap expired atau rancu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Herminawati :

“ Karena pendataan ini sudah ditentukan waktunya biasanya BPS selalu koordinasi sama Kelurahan mbak. Nanti Kelurahan yang mengecek langsung ke lapangan, jadi kalau semisal ada perubahan bisa langsung diubah. Semisal ada tambahan jumlah atau berkurang nanti langsung diubah. Jadi sebelum pembagian raskin semua data sudah fix. Karena di BPS itu kalau data yang lewat tanggal akan dianggap rancu. Oleh karena itu, semua pendataan harus tepat waktu. “

(Sumber : wawancara 23 September 2010)

Jadi penilaian kinerja BPS Surakarta dalam pendataan Rumah Tangga Miskin (RTS) Program Raskin dikatakan tepat waktu apabila semua data RTS termasuk RTS “susulan” sudah siap diedarkan melalui kartu-kartu pengambilan Raskin sebelum hari H pembagian. Dengan begitu, apabila Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta melaksanakan pendataan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tentunya pembagian raskin untuk warga miskin di daerah Surakarta juga tepat waktu. Hal ini tentu saja mendukung keberhasilan Program Raskin di Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar kinerja BPS Surakarta dalam pendataan RTS di Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Hasil dari pendataan tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang berdasarkan pada indikator kinerja teknis, yaitu kesesuaian indikator, akurasi, dan ketepatan waktu (timeliness).

1. Kesesuaian Indikator

Terkait dengan Program Raskin yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta mempunyai andil untuk ikut menyukseskannya dengan berperan sebagai instansi yang melaksanakan pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Terkait dengan kesesuaian indikator ini, kinerja BPS Surakarta dapat dikatakan telah sesuai. BPS dalam kinerjanya mendata RTS yang disesuaikan dengan kriteria penerima Raskin, secara tidak langsung juga akan mengarah pada evaluasi pembangunan yang progresif, khususnya di bidang pangan dan juga mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Surakarta, seperti terlihat dari jumlah penerima Raskin tahun 2009 berjumlah 22.729 berkurang menjadi 21.954 pada tahun 2010..

commit to user

2. Akurasi

Walau secara formal pendataan RTS dilakukan 3 tahun sekali, tetapi BPS akan mengolah data setiap 1 tahun sekali. Dalam melakukan update setiap tahunnya, BPS Surakarta dibantu oleh mitra kerja BPS. Mitra BPS dipilih oleh Kelurahan berdasarkan kriteria yang diberikan oleh BPS. Disinilah peran Kelurahan dalam pendataan RTS sebagai mitra kerja BPS. Jadi, setiap setahun sekali BPS bersama kelurahan akan mengevaluasi data-data penerima Raskin sehingga tingkat akurasi data yang dihasilkan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Pelaksanaan pendataan ini menghasilkan data yang sesuai dengan kriteria penerima. Dalam kenyataannya sebenarnya masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima Raskin, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan adanya *Bagito*. Dengan begitu, hasil kinerja BPS Surakarta dapat dikatakan akurat.

3. Timeliness (Ketepatan Waktu)

Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta diberikan waktu oleh Pemerintah Pusat mulai dari proses di lapangan hingga pengolahannya. Adanya pembatasan waktu tersebut menyebabkan Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta harus bekerja sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut, yaitu dua bulan. Dalam pelaksanaan di lapangan, kinerja BPS sudah tepat waktu yaitu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini terkait dengan

prinsip BPS yaitu apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pendataan akan menyebabkan data tersebut dianggap rancu.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pendataan jumlah Rumah Tangga Sasaran Program Raskin di Surakarta yang dilakukan oleh BPS Surakarta, tidak lepas dari hambatan baik secara teknis maupun sumber daya manusia serta adanya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai data penerima Raskin di Surakarta. Namun dengan adanya hambatan tersebut BPS Surakarta selalu berupaya memberikan kinerja yang terbaik agar dapat memuaskan masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisa data, menurut penulis kinerja BPS Surakarta dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kota Surakarta tersebut sudah sesuai dengan standar kerja dalam menentukan RTS yang benar-benar layak untuk mendapatkan Raskin, sehingga tidak ada saran yang disampaikan oleh penulis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta dalam Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin. Penulis hanya berharap BPS Surakarta tetap mempertahankan kinerja yang selama ini sudah tercipta cukup maksimal, agar kedepannya output yang dihasilkan akan bertambah baik.